

Implementasi Program Pengelolaan Sampah TPST di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



Atam Yudha Suwito

232020100218

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP., M.KP

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

LATAR BELAKANG

1

Permasalahan sampah yang ada di Desa Bligo, setiap hari, setiap minggu jumlah volume sampah terus meningkat, maka pengelolaan sampah di TPST harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat.

2

Sarana dan Prasarana yang ada di TPST Desa Bligo yang masih minim dan kurang lengkap, membuat pengelolaan sampah kurang maksimal.

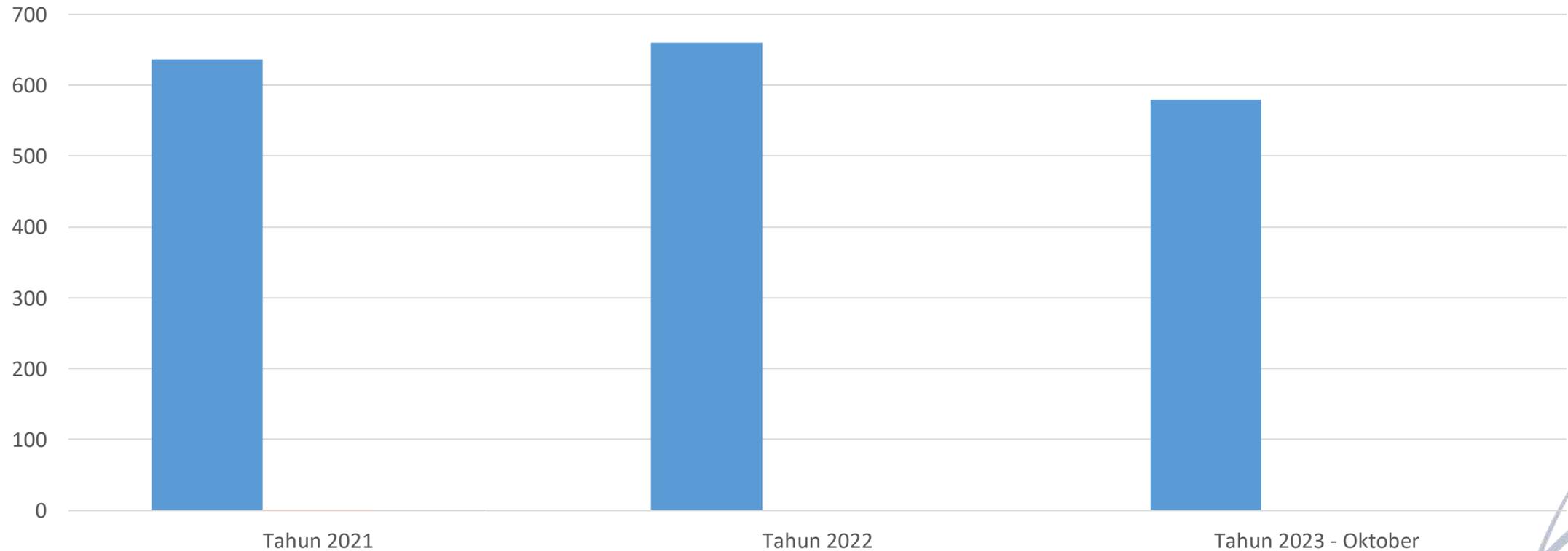
DASAR HUKUM

- ❖ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Nomor 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- ❖ Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Permasalahan Kebersihan.

Permasalahan Dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah TPST Di Desa Bligo

1. Peralatan Pengelolaan Sampah Yang Ada Di TPST Masih Minim
2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
3. Belum Adanya Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Bligo
4. Sarana Motor Pengangkut Sampah (Tosa) yang terbatas

Rekapitulasi Jumlah Tonase Sampah di Pemerintah Desa Bligo



TEORI PENELITIAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III yang ada 4 variabel :

1. **Komunikasi**, yang berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan publik dikomunikasikan pada organisasi publik terutama pemangku kepentingan.
2. **Sumber daya**, adalah sumber-sumber yang tersedia yang dapat menentukan keberhasilan, mencakup sumberdaya manusia, finansial, fisik, informasi, dan teknologi .
3. **Disposisi**, kecenderungan bertindak para implementor/pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.
4. **Struktur Birokasi**, adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

PENELITIAN TERDAHULU

Mochammad Fachrizal Ali (2022) “Implementasi Program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mekarsari di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo”

Hasil penelitian ini bahwa implementasi pengelolaan sampahnya sudah baik meskipun masih belum maksimal.

Edy Nurcahyo dan Ernawati (2019) “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo Kabupaten Buton”

Hasil penelitian ini bahwa di Desa Mabulugo diadakan penyuluhan hukum pengelolaan sampah rumah tangga dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Adapun harapan yang kedua agar Pemerintah Desa Mabulugo dapat membuat Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Mohammad Erdi Ferdiasyah Arsyiah (2014) “Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah (Studi pada Desa Ngampelsari Kecamatan Candi)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pemanfaatan sampah organik yang dilakukan oleh masyarakat desa hanya menggunakan teknologi yang sederhana dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya mengatur pengelolaan sampah tetapi belum menyentuh pemberdayaan masyarakat yang mengolah sampah dan daur ulang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut George Edward III. Teknik pengumpulan data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi mengenai masalah yang ada di lapangan. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Program Pengolahan Sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Bligo

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Berdasarkan Penelitian menggunakan Teori Edward III dengan 4 indikator :

1. Komunikasi :

Dalam hal Komunikasi ini dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Bligo sudah melaksanakan Sosialisasi tentang adanya TPST Desa Bligo.

Pemerintah Desa Bligo memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap program pengelolaan sampah TPST Desa Bligo.

Pemerintah Desa Bligo memberikan sosialisasi dan penjelasan bagaimana cara pemilahan sampah rumah tangga.

Pemerintah Desa Bligo dan Pengurus TPST mengadakan musyawarah dengan pimpinan lingkungan serta tokoh masyarakat tentang pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Sumber Daya

- Sumber Daya manusia yang menjadi pengurus dan pekerja TPST sudah bisa melaksanakan pengelolaan sampah dengan cukup baik.
- Pemerintah Desa Bligo Memberikan Pelatihan dan Studi Banding Kepada Pengurus dan Pekerja TPST Desa Bligo
- Sumber Daya Finansial, Pemerintah Desa Bligo Memberikan Anggaran Untuk TPST Desa Bligo

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Disposisi

- Ketua TPST sudah memberikan tupoksi kepada Kepala masing-masing Pengurus dan Pekerja TPST Desa Bligo

4. Struktur Birokrasi

- Pengelolaan Sampah di TPST Desa Bligo sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada.
- Pengambilan dan pengangkutan, ditaruh di bak penampungan, dipilah sesuai jenisnya, sampah yang bernilai ekonomis dan dapat didaur ulang dijual, residu dibawa ke TPA.

KESIMPULAN

- Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang implementasi program pengelolaan sampah di TPST Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan dengan ditinjau dari 4 aspek yaitu sebagai berikut : **Pertama**, Komunikasi selama implementasi program pengelolaan sampah di TPST Desa Bligo merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Namun, diyakini bahwa komunikasi di Desa Bligo sudah optimal karena sudah ada sosialisasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bligo kepada masyarakat desa mengenai program pengelolaan sampah di TPST Desa Bligo. **Kedua** adalah Sumber Daya, sumber daya dari segi manusia pada implementasi program pengelolaan sampah TPST Desa Bligo sudah mampu dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah yang ada di Desa Bligo. Untuk segi sumber daya finansial sampai saat ini dalam implementasi program pengelolaan sampah TPST Desa Bligo sudah dianggarkan untuk kegiatan sosialisasi. Pada sumber daya fisik atau sarana prasarana TPST Pemerintah Desa Bligo dalam mendukung proses implementasi program pengelolaan sampah TPST sudah memadai, khususnya untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan sampah baik dalam hal perbaikan kendaraan pengangkut sampah dan perbaikan gedung TPST. **Ketiga** adalah Disposisi secara umum sikap dan respon dalam implementasi program pengelolaan sampah TPST ini sudah cukup optimal, karena pengurus, pengawas dan pekerja TPST sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. **Keempat** yaitu Struktur Birokrasi di Desa Bligo sampai saat ini sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang serupa sehingga diupayakan kegiatan program pengelolaan sampah berjalan dengan baik, dengan sesuai tugas jabatan dan tanggungjawab masing-masing. Dari keseluruhan dari hasil penarikan kesimpulan, bahwa peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Bligo agar lebih mengevaluasi atau perbaikan implementasi program pengelolaan sampah TPST dalam hal pengadaan sarana dan prasarana berupa alat pencacah agar TPST bisa menghasilkan pupuk organik dan mengurangi jumlah residu.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH

